



**REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK TANGGAPAN PEMERINTAH  
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR-RI  
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
TANGGAL 24 AGUSTUS 2021**

---

***Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,***

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan waktu, sehingga kita dapat melaksanakan tahapan demi tahapan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020.

Pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu, seluruh fraksi DPR-RI telah menyampaikan pandangan dan apresiasi, termasuk saran dan masukan yang konstruktif kepada Pemerintah. Pemerintah sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPR-RI atas pandangan dan masukan tersebut, yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, sebagai upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang diamanatkan dalam konstitusi.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI yang telah disampaikan oleh Juru Bicara masing-masing Fraksi, yaitu: Anggota yang terhormat **Ibu Mercy Chriesty Barends, S.T.** mewakili **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)**, **Bapak Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.** mewakili **Fraksi Partai Golongan Karya (F-Partai Golkar)**, **Bapak Wihadi Wiyanto, S.H.** mewakili **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Partai Gerindra)**, **Bapak Willy Aditya, S.Fil., M.D.M.** mewakili **Fraksi Partai Nasdem (F-Partai NasDem)**, **Bapak H. Yanuar Prihatin, M.Si** mewakili **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**, **Ibu Hj. Vera Febyanthy, M.Si.** mewakili **Fraksi Partai Demokrat (F-Partai Demokrat)**, **Bapak Dr. H. Hermanto, S.E., M.M.** mewakili **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)**, **Bapak Slamet Ariyadi, S.Psi.** mewakili **Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)**, dan **Bapak Sy. Anas Thahir** mewakili **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).**

Pandangan dari seluruh Fraksi ini merupakan masukan berharga dan mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat secara optimal menghadirkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, yang saat ini sedang menghadapi ujian berat berupa pandemi Covid-19.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan pokok – pokok tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi – fraksi DPR RI mengenai RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut.

**Pemerintah sepakat dengan pandangan F-PDIP, F-Partai Nasdem, dan F-PKS** mengenai efektivitas dan efisiensi serta pengendalian internal dalam pengelolaan APBN yang harus senantiasa ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, APBN TA 2020 telah mengakomodir adanya *refocusing* dan realokasi anggaran di antaranya melalui penghematan belanja K/L yang utamanya bersumber dari belanja barang dan modal, untuk kemudian dialihkan ke pos-pos belanja penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern, khususnya dalam pelaksanaan Program PC-PEN, Pemerintah mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta organisasi kemasyarakatan guna meminimalisir terjadinya potensi penyimpangan pelaksanaan Program PC-PEN, dan menjamin agar manfaat APBN lebih optimal untuk meningkatkan derajat dan kemakmuran rakyat secara luas.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS dan F-PAN**, mengenai realisasi asumsi ekonomi makro yang belum sesuai asumsi pada APBN TA 2020, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

APBN 2020 disusun dan ditetapkan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Ketika pandemi terjadi pada Maret 2020, respon utama yang dilakukan oleh semua negara-negara di dunia adalah dengan melakukan pembatasan mobilitas manusia dalam rangka mencegah penyebaran virus. Hal tersebut berpengaruh signifikan baik bagi perekonomian secara makro maupun terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Pergeseran dari target-target yang telah ditetapkan tersebut menjadi sebuah konsekuensi logis yang sulit dihindari, namun juga tidak boleh diabaikan. Untuk itu Pemerintah berupaya keras menjalankan berbagai program untuk menangani dampak pandemi bagi kesehatan masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang meleset jauh dari target dalam APBN TA 2020, berkaitan sangat erat dengan pengaruh pandemi Covid-19 yang terjadi secara global di tahun 2020. Terjadinya gangguan *supply* dan *demand* atas barang dan jasa telah memberikan efek domino bagi berbagai sektor, sehingga kontraksi pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan krisis global sebelumnya yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga pada hampir seluruh negara di dunia. Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara G-20 dan kawasan sekitar, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,07 persen relatif moderat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya cepat dan *extraordinary* dari Pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh DPR, dan seluruh komponen bangsa dalam mengantisipasi pengaruh pandemi Covid-19. Pemerintah bersinergi dengan otoritas moneter dan pemangku kebijakan lain, bersama-sama menyusun kebijakan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (Program PEN). Melalui program PEN, Pemerintah berupaya mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp695,2 triliun (4,2% dari PDB), dengan fokus pada klaster kesehatan, jaminan sosial, dukungan pada dunia usaha, UMKM, Pemda, dan sektor terdampak lainnya. Hal ini telah membawa hasil yang positif berupa tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menunjukkan arah pemulihan sejak triwulan III tahun 2020 dan diharapkan akan terus berlanjut untuk periode kedepannya.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Menanggapi pandangan dan pertanyaan dari **F-Partai Golkar, F-Partai Demokrat, F-PKB, F-PKS, dan F-PPP** mengenai besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang berdampak pada melonjaknya Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Tahun Anggaran 2020, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut.

Melonjaknya nilai SAL pada akhir Tahun Anggaran 2020, yang berdasarkan LKPP Tahun 2020 (*audited*) tercatat sebesar Rp388,1 triliun, terutama berasal dari perhitungan SAL awal tahun 2020 Rp212,7 triliun dan SiLPA Tahun Anggaran 2020 Rp245,6 triliun. Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat penggunaan SAL sebesar Rp70,6 triliun. SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang cukup besar merupakan bagian dari kebijakan optimalisasi pemanfaatan dana dari penerbitan SBN skema Kerja Sama *Burden Sharing* antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga pada akhir tahun terdapat outstanding dana yang ditempatkan Pemerintah di perbankan dalam rangka PC-PEN sebesar Rp66,7 triliun dan sisa dana untuk kegiatan PC-PEN *Public Goods* dan *Non Public Goods* yang belum dapat dilaksanakan secara sekaligus pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp57,1 triliun. SiLPA yang cukup besar ini menjadi sumber pembiayaan berupa Penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya, yang nilainya direncanakan sebesar Rp139,4 triliun. Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung pembiayaan yang inovatif dan *sustainable* serta menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien sehingga dapat mengurangi penerbitan SBN dan mendukung pembiayaan investasi yang diperlukan.

Penempatan dana pada perbankan sebesar Rp66,7 triliun sejatinya telah digunakan dalam Program PC-PEN berupa dukungan Pemerintah kepada sektor usaha. Penempatan dana ini telah menghasilkan *multiplier effect* berupa dukungan perbankan kepada UMKM yang nilainya mencapai lebih kurang Rp218,9 triliun. Pendanaan kegiatan penempatan dana pada perbankan ini berasal dari SBN Khusus dari Kerjasama Pemerintah dengan Bank Indonesia dalam kategori *Non Public Goods*, dengan nilai total penarikan dana sebesar Rp177,0 triliun. Namun demikian, karena penempatan dana tidak bersifat jangka panjang (kurang dari satu tahun anggaran) maka transaksi ini dicatat sebagai bagian dari transaksi pengelolaan kas atau transaksi non anggaran, sehingga menjadi bagian dari SiLPA akhir Tahun Anggaran 2020.

Selain kegiatan penempatan dana tersebut, juga terdapat sisa dana SBN Khusus dari kerja sama Pemerintah dengan Bank Indonesia untuk PC-PEN sebesar Rp57,1 triliun yang belum digunakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020. Sisa dana SBN Khusus ini dicadangkan antara lain dalam rangka pembayaran pengadaan vaksin, insentif tenaga kesehatan, dan perawatan pasien Covid-19, serta pemberian dukungan kepada

UMKM berupa subsidi bunga KUR dan Non KUR pada Tahun Anggaran 2021. Jadi, dapat kami sampaikan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebagian besar berasal dari kegiatan PC-PEN, yang memang diperlukan untuk percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, yang bukan hanya untuk pelaksanaan di Tahun Anggaran 2020, tetapi juga secara berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2021 atau setelahnya.

Selanjutnya, terhadap pandangan **F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS dan F-PPP** mengenai pengelolaan defisit dan utang, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah selalu merencanakan pembiayaan dengan hati-hati setiap tahun, melalui perhitungan yang terintegrasi dengan rencana penerimaan dan belanja dalam APBN yang kemudian disepakati bersama dengan DPR RI. Sebagai respon atas adanya pandemi Covid-19, dalam pelaksanaan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2020, Pemerintah tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR mengenai langkah-langkah penanganan yang telah dan akan dilakukan. Di tahun 2020, meskipun terjadi kenaikan utang, pembiayaan APBN tetap dijaga dalam kondisi aman, sehingga rasio utang tetap berada di bawah 60% terhadap PDB.

Dalam kondisi pandemi, hampir seluruh negara melakukan pelebaran defisit di tahun 2020. Defisit APBN Indonesia melebar menjadi 6,1% per PDB, relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, seperti India (12,3%), China (11,4%), Jepang (12,6%), Inggris (13,4%) dan Amerika Serikat (15,8%). Sebagai dampak dari pelebaran defisit tersebut, rasio utang Indonesia terhadap PDB tahun 2020 meningkat menjadi 39,4% atau naik 9,2% dibandingkan tahun 2019. Namun demikian, negara lain juga memiliki rasio utang yang meningkat dan peningkatannya bahkan lebih tinggi dibandingkan Indonesia, misalnya India menjadi 89,6% (naik 15,7%), China 66,8% (naik 9,8%), Jepang 256,2% (naik 21,4%), Inggris 103,7% (naik 18,4%), dan Amerika Serikat 127,1% (naik 18,9%).

Pemerintah terus berupaya untuk menekan konsekuensi peningkatan bunga agar tidak menggerus ruang fiskal di masa depan, melalui berbagai kebijakan *extraordinary*, antara lain melalui kerjasama dengan Bank Indonesia (BI). Dalam skema yang ditetapkan dalam SKB I, BI bertindak sebagai *standby buyer* atau *backstop* pembiayaan utang, dimana BI dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan/*Green Shoe Option* (GSO) dan penawaran langsung/*Private Placement* (PP). Selanjutnya, berdasarkan SKB II, Pemerintah bersinergi dengan BI melalui kebijakan *burden sharing* untuk membiayai penanganan pandemi, dimana BI ikut menanggung biaya utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kerjasama yang solid antara Pemerintah dan BI, didukung oleh kondisi keuangan yang kondusif serta kecukupan

likuiditas pasar domestik sampai akhir tahun 2020, dapat menekan turunnya yield SUN 10 tahun dari kisaran 8,3% di bulan Maret menjadi 5,9% di akhir tahun 2020.

Menanggapi pandangan dari **F- Partai Nasdem, F-PKB dan F-PKS** terkait rasio perpajakan, piutang perpajakan, insentif perpajakan dan optimalisasi peranan otoritas perpajakan, dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Penurunan *tax ratio* pada tahun 2020 menjadi bagian yang tidak terelakkan dengan adanya pandemi Covid-19, antara lain karena menurunnya basis penerimaan pajak akibat pembatasan sosial-ekonomi, disrupsi lalu lintas perdagangan internasional, pemberian stimulus fiskal, termasuk di antaranya insentif pajak yang nilainya cukup signifikan. Pemerintah terus berusaha meningkatkan *tax ratio* melalui perluasan basis perpajakan dan reformasi perpajakan. Pada tahun 2020 pemerintah tetap berupaya memperluas basis perpajakan misalnya melalui pengenaan pajak perdagangan melalui sistem elektronik, khususnya PPN atas transaksi elektronik bagi pelaku usaha digital. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas tindakan penagihan piutang pajak. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa penagihan, pemerintah melakukan hapus buku agar lebih mencerminkan hak negara atas piutang pajak yang masih dapat ditagih.

Di samping itu, Pemerintah tetap melakukan perbaikan dan penyempurnaan melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada 5 (lima) pilar, yaitu: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Basis Data, Proses Bisnis, dan Regulasi Perpajakan. Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengimplementasikan *Taxpayer Accounting* modul *Revenue Accounting System* (RAS) sebagai upaya memperbaiki tata kelola piutang perpajakan. Kombinasi dari upaya-upaya tersebut pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan *tax ratio* ke level yang optimal.

Berkaitan dengan Insentif perpajakan khususnya pada era pandemi Covid-19 ini, insentif perpajakan masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga untuk masyarakat kelas menengah, serta dunia usaha sehingga seluruh komponen bangsa dapat bahu membahu mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Apabila kita melihat program PEN secara menyeluruh, kepada masyarakat berpenghasilan rendah sudah diberikan berbagai jenis insentif dan perlindungan sosial, termasuk untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat tersebut. Di sisi lain, selama pandemi, masyarakat kelas menengah Indonesia cenderung menunda konsumsi dan memilih untuk menyimpan penghasilannya. Oleh karena itu, untuk mendorong konsumsi maka terhadap sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,

misalnya industri kendaraan bermotor, diputuskan untuk diberikan insentif berupa PPnBM DTP. Dengan insentif tersebut, diharapkan konsumsi masyarakat di awal 2021 dapat tumbuh untuk kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sedangkan, pemberian insentif fiskal terhadap impor barang penanganan kesehatan (obat, vaksin, alat kesehatan) dan dalam rangka menjaga perekonomian tetap perlu dipertahankan. Insentif yang disediakan Pemerintah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu dibuktikan dari survey kepada penerima fasilitas tahun 2020, dengan hasil yang menunjukkan adanya manfaat yang sangat besar dari adanya berbagai fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha.

Pemerintah senantiasa berusaha untuk terus mengoptimalkan peran serta otoritas perpajakan. Di bidang pengawasan, penyidikan maupun penagihan, Pemerintah telah berupaya mengedepankan manajemen risiko dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Pemerintah juga serius dalam memperbaiki kualitas pelayanan, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam bentuk *online tax system* dalam pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak, pelayanan *paperless* dokumen impor, nasional logistik ekosistem, serta kemudahan dan pembebasan impor alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Menanggapi pandangan dari **F-PDIP, F-Partai Gerindra, F-PKB, F-Partai Demokrat, dan F-PAN** agar Pemerintah menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah senantiasa berkomitmen dan konsisten menindaklanjuti rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan *action plan* yang rinci dan terukur atas seluruh rekomendasi BPK, di samping melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Indonesia, sebagaimana negara-negara lain di dunia, sedang menghadapi ujian yang sangat berat berupa pandemi Covid-19. Munculnya varian delta Covid-19 di tahun ini telah membuat dunia kembali menghadapi lonjakan kasus penularan yang sebelumnya sudah sempat melandai. Pemerintah senantiasa berupaya untuk hadir di tengah masyarakat dengan mengoptimalkan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah senantiasa mengajak semua komponen bangsa untuk selalu mentaati protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Di samping itu, akselerasi program vaksinasi

yang diiringi dengan *Testing, Tracing* dan *Treatment*, diharapkan dapat segera membawa kita menuju tatanan kebiasaan hidup baru di tengah-tengah pandemi yang diperkirakan masih akan berlanjut sampai beberapa waktu ke depan.

Pemerintah sekali lagi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi di DPR-RI, karena secara umum memahami dan mendukung kebijakan *extraordinary* yang diambil Pemerintah, demi efektifnya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah tersebut, terutama bertujuan agar masyarakat tetap dapat optimal merasakan manfaat APBN di masa pandemi Covid-19.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,**

Demikianlah tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020. Tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI secara lebih rinci, kami sampaikan secara tertulis pada lampiran pidato ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan Pemerintah. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR-RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi setiap usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusional dari rakyat Indonesia, sehingga kepercayaan rakyat terhadap pemenuhan janji dan cita-cita Republik Indonesia tercinta akan senantiasa tetap terjaga.

**Sekian dan terima kasih,**

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,***

***Shalom***

***Om Shanti Shanti Shanti Om,***

***Namo Buddhaya,***

***Salam Sehat untuk kita semua.***

**Jakarta, 24 Agustus 2021**

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia  
Menteri Keuangan,**

**ttd**

**Sri Mulyani Indrawati**